

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010). Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian Laporan Keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas (PP No. 71 Tahun 2010). Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan.

Untuk mencapai hal tersebut, Standar Akuntansi Pemerintah menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan (Zeyn, 2011), dengan demikian, penyelenggaraan Akuntansi di pemerintah daerah harus merujuk baik pada Standar Akuntansi Pemerintahan maupun pada peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Dalam praktiknya, dua rujukan tersebut disinkronkan didalam kebijakan akuntansi dan sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Budi Mulyana, 2014:6).

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yaitu SAP diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010).

Menurut peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, Manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful*. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku, dalam hal ini peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan pengganti peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sampai dengan tahun anggaran 2013, pemerintah daerah masih menerapkan SAP berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan fundamental peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan

peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Adapun delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010) yaitu: Basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip prioritas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar.

3. Ditetapkannya PP SAP

Dengan ditetapkan PP SAP, diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara guna mewujudkan pemerintah yang baik (good governance). Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintah.

Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah menyusun sistem akuntansi yang mengacu pada SAP, sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah akan diatur dengan peraturan menteri keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota, mengacu pada Perda tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta di dukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting sebagai unggulan dibidang tersebut (wibowo, 2007:86). Sedangkan menurut Amstrong (dalam Dharma, 2005,102) kompetensi mengacu pada dimensi perilaku dari sebuah peran atau perilaku yang diperlukan seseorang untuk dapat meleksanakan pekerjaannya secara memuaskan. Dengan demikian kompetensi merupakan suatu kemampuan melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki.

Menurut Alwi (2006:6) sumber daya manusia atau *human resource* adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang sering pula disebut karyawan atau pegawai. Sedangkan menurut nawawi (2001:57) sumber daya manusia adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, tenaga kerja, dll.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah suatu yang dapat memberikan gambaran tentang kemampuan suatu individu sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas tertentu kompetensi sumber daya manusi juga dapat diartikan sebagai karakteristik dasar individu yang dalam hubungan sebab akibat berkaitan dengan performa yang efektif atau sepersior dalam suatu pekerjaan atau jabatan.

5. Tujuan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Hutapea dan Nurianna (2008: 16-19) kompetensi dalam organisasi atau perusahaan pada umumnya bertujuan untuk:

- a) Pembentukan pekerjaan (*job design*)
Kompetensi teknis dapat digunakan untuk menggambarkan fungsi, peran, dan tanggung jawab pekerjaan di suatu organisasi. Besarnya fungsi, peran dan tanggung jawab tersebut tergantung dari tujuan perusahaan, besar kecilnya perusahaan, tingkat atau level pekerjaan dalam organisasi serta jenis usaha sedangkan kompetensi perilaku digunakan untuk menggambarkan tuntutan pekerjaan atas perilaku pemangku jabatan agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan prestasi luar biasa.
- b) Evaluasi pekerjaan (*job evaluation*)
Kompetensi dapat dijadikan salah satu factor pembobot pekerjaan, yang digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan serta tantangan pekerjaan merupakan komponen yang memberikan porsi terbesar dalam menentukan bobot suatu pekerjaan. Pengetahuan dan keterampilan tersebut adalah komponen dasar pembentuk kompetensi.
- c) Rekrutmen dan seleksi (*recruitment and selection*)
Pembentukan organisasi biasanya diikuti dengan pembentukan pekerjaan serta penentuan persyaratan atau klarifikasi orang yang layak melaksanakan pekerjaan tersebut. Kompetensi dapat digunakan sebagai salah satu komponen dalam persyaratan jawaban, yang kemudian dijadikan pedoman untuk menyeleksi calon karyawan yang akan menduduki jabatan atau melaksanakan pekerjaan tersebut.
- d) Pembentukan dan pengembangan organisasi (*organization design and development*)
Organisasi yang kukuh adalah organisasi yang mempunyai kerangka fondasi yang kuat. Kekuatan kerangka dan fondasi ditentukan oleh kemampuan teknis, nilai atau budaya organisasi serta semangat kerja atau motivasi orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Kompetensi dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pembentukan dan pengembangan organisasi kearah organisasi yang produktif dan kreatif apabila semua orang kearah organisasi.
- e) Membentuk dan memperkuat nilai dan budaya perusahaan (*company culture*)
Peran kompetensi perilaku sangat diperlukan untuk membentuk dan mengembangkan nilai budaya perusahaan (culture) system budaya kerja yang produktif. Pembentukan nilai-nilai produktif dalam organisasi akan mudah tercapai apabila pemilihan nilai-nilai budaya perusahaan sesuai dengan kompetensi inti perusahaan.
- f) Pembelajaran organisasi (*organizational learning*)

Peran kompetensi bukan hanya untuk menambah pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga untuk membentuk karakter pembelajaran yang akan menopang proses pembelajaran yang berkesinambungan.

- g) Manajemen karier dan penilaian potensi karyawan (*career management & employee's assessment*)
 Kerangka dan tindakan kompetensi dapat digunakan untuk membantu perusahaan atau organisasi menciptakan pengembangan ruang karir bagi karyawan untuk mencapai jenis karir yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, melalui *assessment centre* (pusat penilaian potensi karyawan). Penggunaan kompetensi dapat mendorong pengembangan karier yang lebih terpola dan sejalan dengan kebutuhan perusahaan.
- h) Sistem timbal jasa (*reward system*)
 Sistem imbal jasa akan memperkuat dan diperkuat oleh kerangka pekerjaan yang berbasis kompetensi. artinya, pemberian imbalan jasa yang dihubungkan dengan pencapaian kompetensi individu akan mendukung pelaksanaan sistem kompetensi yang digunakan oleh perusahaan secara keseluruhan. Sebaiknya, sistem kompetensi yang baik akan membantu mengaktifkan sistem imbal jasa yang berlaku dalam perusahaan.

6. Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi

Kompetensi bukan merupakan kemampuan yang tidak dapat dipengaruhi Michael Zwell dalam Wibowo (2007:102) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu sebagai berikut:

- a. Keyakinan dan nilai-nilai
- b. Keterampilan
- c. Pengalaman
- d. Karakteristik kepribadian
- e. Motivasi
- f. Kemampuan intelektual
- g. Budaya organisasi

Sumber daya manusia perlu memahami kecenderungan organisasi multikultural dan keberagaman kultural. Dengan demikian sumber daya manusia perlu memahami masalah dalam keberagaman budaya. Maka, kompetensi sumber

daya manusia semakin penting bagi eksekutif, manajer, maupun pekerja (spencer dalam wibowo, 2007:98)

7. Laporan Keuangan Daerah

a. Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 adalah ”laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan”

Menurut ikatan akuntansi Indonesia (2002 PSAK par.7) defenisi laporan keuangan adalah: “laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (seperti laporan arus kas), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”. Sedangkan menurut PP No 8 tahun 2006, laporan keuangan adalah bentuk pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode.

b. Tujuan Laporan Keuangan Daerah

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tujuan umum laporan keuangan adalah:

Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas,dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Menurut indra Bastian (2010:9) Laporan Keuangan menggambarkan yaitu:

Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.

Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009:159)

c. Komponen Laporan Keuangan Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 laporan keuangan pemerintah pusat/daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Menyediakan informasi mengenai anggaran dan Realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsure-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Neraca
Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
4. Laporan Operasional (LO)
Salah satu unsure laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang

dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas
Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan
Memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara.

8. Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 mengatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (PP 71 tahun 2010)

1. Relevan
Laporan keuangan bias dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
2. Andal
Dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat di verifikasi informasi yang andal memenuhi karakteristik: penyajian jujur, dapat diverifikasi, netralitas.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas merupakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang di perbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

9. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman dan prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada pengguna laporan keuangan. Dengan demikian signifikansi peran akuntansi sektor publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, semakin nyata dengan dikeluarkannya PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yang kemudian direvisi dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur SAP berbasis Akrua. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah (Abdul Halim, 2012:261).

Selain itu Deddi Nordiawan (2006:25) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik dipemerintah pusat dan departemen-departemenya maupun dipemerintahan daerah

dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan dipemerintahan pusat dan Daerah.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di Pemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di Pemerintahan dan jga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Semakin tinggi tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka kualitas laporan keuangan pemerintahan akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka kualitas laporan keuangan pemerintah akan semakin rendah.

10. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu secara simultan atau secara bersama-sama kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar Akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

a. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian tentang standar penerapan akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Beberapa diantaranya yang diajukan acuan adalah:

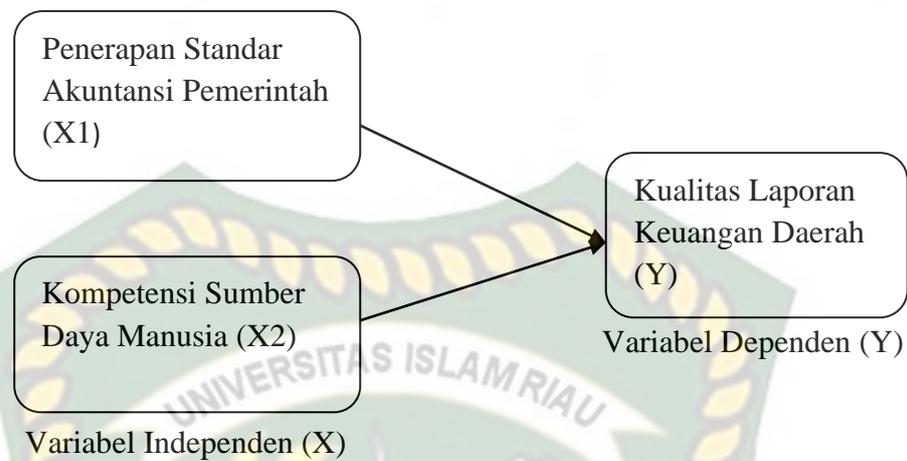
Tabel II.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Kadek Desiana Wati, dkk (2014)	Pengaruh kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2	Tulus Harefa (2013)	Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
3	Desy Sefri Yensi (2014)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah.	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

4	Emilda Ihsanti (2014)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini Adalah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
5	Imrah Maulida,dkk (2014)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini Adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
6	Andika Fransiska Ritonga (2015)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini Adalah penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Model Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu, maka peneliti membuat kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



B. Hipotesis

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang mempunyai sifat sementara dan untuk menyakinkan jawaban sementara harus dilakukan suatu pengujian terhadap data tersebut sehingga sampai terbukti bahwa jawaban setelah dilakukan pengujian dapat menghasilkan data yang benar. Hipotesis pada penelitian ini adalah:

- H₁: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- H₂: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- H₃: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.